



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
- e. Kegiatan Usaha dan Jasa adalah seluruh kegiatan usaha dan jasa yang dilakukan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang menimbulkan gangguan dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- f. Izin adalah Izin Gangguan yang diberikan bagi kegiatan usaha yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatblat Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblat Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- g. Retribusi izin adalah retribusi yang dipungut terhadap permohonan izin;
- h. Gangguan adalah dampak yang diperkirakan timbul dari jenis kegiatan usaha tertentu;
- i. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Usaha/Badan Hukum yang melakukan kegiatan usahanya di daerah;
- j. Indeks Lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya;
- k. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh gangguan usaha yang akan dilakukan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Objek izin adalah jenis kegiatan usaha tertentu yang diperkirakan menimbulkan gangguan disekitarnya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek izin adalah Perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 4

Subjek izin adalah setiap orang atau Badan yang mendirikan, memperluas dan memindahkan kegiatan usaha di daerah yang berkaitan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Staatblat Tahun 1926 Jo.Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO).

BAB III PERIZINAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha yang akan membuka kegiatan usaha tertentu harus memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala daerah dengan mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan sesuai dengan contoh pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara permohonan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Apabila membuka usaha tanpa izin sebagaimana ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Permohonan Izin baru :
 - a. Photo copy surat izin lokasi;
 - b. Photo copy KTP dan NPWPD perusahaan yang bersangkutan;
 - c. Photo copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan hukum/ Badan Usaha atau Photo copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 - d. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan untuk perusahaan tersebut;
 - e. Photo copy sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;
 - f. Rancangan tata letak instalansi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
 - g. Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan;

- h. Bagan alir proses produksi deilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
 - i. Rekomendasi Camat dan kepala desa/lurah setempat;
 - j. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - k. Izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan tempat usaha (perjanjian sewa menyewa kontrak pinjaman atau sertifikat dan sejenisnya);
 - l. Sketsa lokasi.
- (2) Pendaftaran ulang :
- a. Photo copy izin usaha yang telah dimiliki;
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Photo copy NPWP dan NPWPD;
 - d. Tanda bukti lunas PBB.
- (3) Izin perpanjangan / perubahan :
- a. Photo copy KTP;
 - b. Pas photo 3 x 4 Cm;
 - c. Keterangan bukti hak bangunan tempat usaha;
 - d. Tanda bukti lunas PBB;
 - e. Tanda bukti NPWP dan NPWPD;
 - f. Melampirkan Surat Izin Gangguan yang telah dimiliki;
 - g. Salinan keterangan perusahaan pimpinan, bukti nama, penyerahan dan sebagainya.

Pasal 7

- (1) Izin tak dapat dipinda-tanggankan kepada pihak lain tanpa izin Kepala Daerah.
- (2) Setiap perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usahanya wajib memperbaharui izin yang telah ada dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Apabila pengusaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Khusus untuk bidang usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

Masa berlakunya izin adalah :

- a. Untuk izin sementara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;

- b. Untuk usaha tetap, berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.

Pasal 10

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. Pemilik/pemegang izin menghentikan/menutup tempat usahanya;
- c. Pemilik/pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya;
- d. Pemilik/pemegang izin memperluas tempat usahanya tanpa izin Kepala Daerah;
- e. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- f. Ditutup/diberhentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemilik/pemegang izin tidak melakukan aktifitas usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan surat izin.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Retribusi izin dihitung berdasarkan :

- Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (G), Indeks Lokasi (L), dan Jenis Usaha (JU).

(2) Rumus perhitungan Retribusi $TL \times TU \times L \times G$

Pasal 12

Besarnya nilai indeks ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi.

Pasal 13

(1) Klasifikasi penentuan besarnya nilai faktor indeks lokasi dan indeks gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Besarnya indeks lokasi adalah 1 sampai dengan 3 dengan ketentuan :

- a. Indeks 1 : untuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya berada dalam tempat yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dikawasan perdagangan, kegiatan indeks khusus dalam kawasan industri dan berada jauh dari pemukiman penduduk;
- b. Indeks 2 : untuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya tidak pada pada tempat yang telah dikhususkan/ditentukan berada pada pemukiman penduduk;
- c. Indeks 3 : untuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya bukan ditentukan/dikhususkan tetapi berada pada pemukiman penduduk.

(3) Besarnya Indeks Gangguan adalah 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan :

- a. Indeks 1 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat

rendah;

- b. Indeks 2 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya rendah;
- c. Indeks 3 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sedang;
- d. Indeks 4 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya tinggi;
- e. Indeks 5 : untuk tempat usaha/kegiatan yang tingkat pencemarannya sangat tinggi;

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan adalah :

No	JENIS USAHA	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	TARIF LINGKUNGAN M ² (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perusahaan / Industri			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 4.000,00 Rp. 2.000,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.500,00 Rp. 1.750,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.500,00	
	d. Golongan D	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,00 Rp. 1.500,00	
2.	Penggilingan padi/Huler gabah.			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,00 Rp. 1.250,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.250,00	
3.	Tempat penimbunan			
	- BBM			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.250,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00	
	d. Golongan D	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.300,00 Rp. 1.100,00	
	- Material bangunan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	

	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.300,00
4.	Pertambangan - Bahan Galian Golongan A		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 4.000,00 Rp. 2.000,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.500,00
	- Bahan Galian Golongan B		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.500,00 Rp. 1.750,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.350,00
	- Bahan Galian Golongan C		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 4.000,00 Rp. 2.000,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.750,00
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00
5.	Pemecahan Batu		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.350,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.200,00
6.	Bengkel / Tempat Las		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.350,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.250,00
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
7.	Tempat hiburan - Discotigue/Night Club/Bar		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,00 Rp. 1.500,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	- Karaoke/Musical Slow		
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.500,00

		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.300,00	
	- Billiard			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.750,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.250,00	
	- Video Game			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 1.750,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.300,00	
	- Bioskop			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.350,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 1.750,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.200,00	
	d. Golongan D	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.100,00	
8.	Panti Pijat			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.350,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.300,00	
9.	Usaha Pertanian/Peternakan/ Perikanan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.350,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ²	Rp. 1.500,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.300,00	
10.	Perdagangan			
	- Swalayan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ²	Rp. 2.000,00	
		> 100 M ²	Rp. 1.500,00	

	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.300,00	
	- Grosir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.350,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00	
11.	Ruang Penyimpanan	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
12.	Percetakan/sablon/photo copy/Studio Photo			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.500,00 Rp. 1.500,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.350,00	
13.	Hotel Penginapan			
	a. Hotel Berbintang 4 & 5	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
	b. Hotel Berbintang 1 - 3	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.350,00	
	c. Guest House/Wisma/Losmen/Hotel tidak berbintang.	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 3.000,00 Rp. 1.200,00	
14.	Penyewaan			
	- Laser Disc/Video Cassete			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.300,00	
	- Alat-alat Berat			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.300,00	
15.	Show Room			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.500,00	

16.	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.350,00	
	Pandai Besi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 2.000,00	
17.	Cold storage/Ruang Pendingin			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,00 Rp. 1.300,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.150,00	
	18. Pariwisata - Tempat Bermain Anak dan rekreasi.			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.500,00 Rp. 1.500,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00	
19.	Vulkanisir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.700,00 Rp. 1.200,00	
	20. Penangkar Hewan/Tumbuhan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.200,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.150,00	
	21. Perdagangan Eceran - Toko Bangunan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00	
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.250,00	
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00	
	- Toko Elektronik			

	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.700,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.250,00
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
	- Toko Obat-obatan Apotik/Pestisida/Pupuk		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
	- Toko Penjualan Gas		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
22.	Restoran/Rumah Makan/ Warung Kopi		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.200,00
	c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.100,00
23.	Salon		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
24.	Fitness Centre/Aerobic		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.200,00
25.	Rumah Sakit/Praktek Medis/ Klinik		
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.300,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ²	Rp. 1.750,00

26.	Pasar Ikan/Daging Hewan/ Buah-buahan	> 100 M ²	Rp. 1.500,00	
		a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.750,00
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.750,00 Rp. 1.500,00	
		c. Golongan C	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 1.500,00 Rp. 1.300,00

Pasal 15

Penggolongan jenis usaha ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Selain dikenakan retribusi, setiap pengajuan permohonan izin dikenakan biaya leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembayaran retribusi dan biaya administrasi lainnya dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada :
 - a. Kegiatan usaha yang sudah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan;
 - b. Kegiatan usaha yang dapat dipertimbangkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenakan denda sekurang-kurangnya 50 % dan sebanyak-banyaknya 100 % dari pokok retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jenis usaha telah mempunyai izin diwajibkan kepada pemilik 3 (tiga) bulan sekali diperiksa dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Badan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata menimbulkan gangguan yang membahayakan lingkungan, kepada perusahaan tersebut dapat diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Terhadap perusahaan yang mendapat tindakan sebagai hasil pemeriksaan dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini diwajibkan menetralsisir gangguan tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan, izinnya akan dicabut.

Pasal 22

Setiap perusahaan yang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya izin yang telah diterbitkan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Apabila tempat usaha menimbulkan gangguan yang mengakibatkan kerugian lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga

dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua kegiatan usaha yang sudah ada atau sudah dijalankan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin gangguan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur, dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 April 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 8 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tingkat Satu
NIP. 010156299

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 07 SERI C NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 07 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menjamin adanya ketenangan, keamanan dan ketertiban, baik untuk usaha perdagangan bagi pengusaha maupun bagi kepentingan masyarakat sekitarnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Landak maka dipandang perlu mengatur pemberian ijin Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordinatie (HO) Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblat Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi usaha yang dilaksanakan masyarakat di Kabupaten Landak sebagai salah satu potensi yang harus selalu ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Daerah, dimana perlindungan diberikan oleh Pemerintah Daerah akan memberi rasa aman bagi masyarakat sebagai salah satu cara untuk membina perekonomian rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Landak ini diharapkan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dapat tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7